

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) INDONESIA MENUJU 23% TARGET BAURAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) 2025

Genesa Lahope ¹⁾

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

geneslahope14@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah menetapkan target ambisius bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% yang harus tercapai pada tahun 2025. Indonesia sebagai negara konsumen energi terbesar di Asia Tenggara, memiliki pemanfaatan EBT yang masih rendah dan sumber energi lebih dari 85% didominasi oleh energi fosil. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengetahui apakah target 23% bauran EBT Indonesia di tahun 2025 dapat tercapai dilihat dari implementasi KEN. Data dikumpulkan melalui studi literature dan studi dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa target tersebut pesimis tercapai di tahun 2025, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi sosio-ekonomi, perhatian media, dukungan publik, dan sikap kepemimpinan pemerintah Indonesia yang kurang memadai.

Kata Kunci: Energi Baru Terbarukan, Kebijakan Energi, Transisi Energi

Abstract

The Indonesian government, through the National Energy Policy (KEN), has set an ambitious target of achieving a 23% share of renewable energy in the energy mix by 2025. Indonesia, being the largest energy consumer in Southeast Asia, currently has a low utilization of renewable energy sources, with fossil fuels dominating the energy landscape. This study employs a qualitative approach with a descriptive method to assess whether Indonesia's 2025 target of 23% renewable energy can be met based on the implementation of the KEN. The results of the study indicate that achieving this target by 2025 appears pessimistic, influenced by factors such as socio-economic conditions, media attention, public support, and inadequate government leadership attitudes in Indonesia.

Keywords: *New and Renewable Energy, Energy Policy, Energy Transition*

PENDAHULUAN

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan konsumsi energi terbesar, dan di Asia Pasifik, menduduki posisi ke-5 teratas di tahun 2018 (Afriyanti, Sasana, & Jalunggono, 2020). Akan tetapi, bauran energi primer Indonesia masih didominasi energi fosil dan diprediksi masih akan terus berlanjut sampai dengan masa-masa yang akan datang (Setiawan, 2021). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam (Cendra, 2022) mencatat kontribusi energi fosil pada bauran energi

History:

Received : 09 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted : 25 Januari 2024

Published: 21 Februari 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



primer Indonesia mencapai 87,4 % di tahun 2022, dan rata-rata kontribusi energi fosil pada bauran energi primer Indonesia diantara tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 adalah sekitar 86%.

Penggunaan energi fosil memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan, seperti polusi, efek gas rumah kaca serta pemanasan global. Dampak buruk bagi kesehatan juga menjadi salah satu efek dari hasil pembakaran energi fosil. (Nugroho, 2019) Menyadari dampak buruk dari penggunaan energi fosil yang berdampak pada perubahan iklim secara global dan mengancam keberlangsungan hidup di masa mendatang, melalui Perjanjian Paris, 196 negara di dunia berkomitmen untuk menjaga “peningkatan suhu rata-rata global agar tetap terkendali.” (UNCC, n.d.)

Pada Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara nasional dengan target pengurangannya adalah 29% hingga 41% pada tahun 2030, dengan berdasarkan kondisi bisnis seperti biasa (business-as-usual-BAU). Perjanjian Paris ini mencakup sektor energi, deforestasi, dan adaptasi perubahan iklim. (SolarKita, 2021). Indonesia sendiri telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 25 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang “Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change”. (Suwatno, 2022)

Selain Perjanjian Paris, isu ini juga masuk di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya pada tujuan nomor 7 dalam SDGs yaitu "Energi Terbarukan dan Terjangkau" yang bertujuan untuk memastikan akses yang luas dan berkelanjutan terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern (Perserikatan Bangsa - Bangsa, n.d.). Terdapat berbagai forum-forum internasional lainnya juga yang dibentuk untuk berfokus pada isu ini, diantaranya International Renewable Energy Agency (IRENA), International Energy Agency (IEA). Forum-forum ini juga mendorong Indonesia sebagai salah satu negara anggota untuk melakukan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), untuk mendukung realisasi komitmen Indonesia di Perjanjian Paris.

Dengan kesadaran akan dampak buruk dari penggunaan energi fosil, sebelum Indonesia menandatangani Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang transisi energi dari pemanfaatan energi fosil menuju pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang “Kebijakan Energi Nasional (KEN)” dan ditetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada total energi primer Indonesia sebanyak 23% yang harus dicapai pada tahun 2025, dan 31% pada tahun 2050. Target ini merupakan salah satu dari 6 target dalam KEN, secara spesifik diatur di dalam pasal 9 kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah target 23% bauran EBT Indonesia di tahun 2025 dapat tercapai dilihat dari implementasi KEN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Dokumentasi dan Studi Literatur.

Kerangka analisis implementasi Kebijakan Publik dari Sabatier dan Mazmanian (1980) mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan datang dari kebijakan itu sendiri dan juga dari luar kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang datang dari luar kebijakan, diantaranya (1) Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi (2) Perhatian media (3) Dukungan publik (4) Sikap kelompok yang berkepentingan (5) Dukungan dari badan pengawas (6) Sikap dan keterampilan kepemimpinan. Faktor-faktor ini dijadikan kriteria-kriteria yang digunakan untuk melihat penyelenggaraan Kebijakan Energi Nasional (KEN) menuju pencapaian target pertama di tahun 2025, apakah target tersebut berpotensi tercapai atau tidak.

4 dari 6 faktor yang dikedepankan oleh Sabatier dan Mazmanian akan digunakan yaitu kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, perhatian media, dukungan publik dan Sikap dan keterampilan kepemimpinan, sebagai kriteria untuk menganalisis implementasi KEN menuju pencapaian target bauran EBT Indonesia tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Progres Pencapaian Bauran EBT Pada Total Energi Primer Indonesia

Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dikeluarkan pada tahun 2014 menetapkan 23% target bauran EBT Indonesia harus di capai pada tahun 2025 – dua tahun dari sekarang, dan 31% pada tahun 2050. Sejak KEN dikeluarkan, belum terlihat progres yang signifikan pada angka bauran EBT Indonesia.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (2022) melaporkan bahwa Indonesia memiliki total potensi energi terbarukan untuk pembangkit listrik sebesar 3.643 GW. Namun, sampai dengan tahun 2021, baru 0,3% atau sebesar 11,6 GW yang dimanfaatkan. Uraian komposisinya berdasarkan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (2022) terlihat seperti pada table berikut:

Tabel 1. Susunan Potensi dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan Indonesia tahun 2021

Komoditas EBT	Total Potensi 2021 (GW)	Kapasitas Pembangkit Listrik (GW)	% Pemanfaatan
Samudera	17,9	-	-
Panas Bumi	23,9	2,3	9,6%
Bioenergi	56,9	2,3	4,0%
Bayu	154,9	0,2	0,1%
Hidro	95,0	6,6	7,0%
Surya	3.294,4	0,2	0,01%
Total	3.643,0	11,6	0,3%

Pada tahun 2022, kapasitas terpasang pembangkit listrik yang berasal dari pembangkit EBT naik dari 11,6 GW menjadi 12,5 GW. Dalam persen, pemanfaatannya masih tetap pada angka 0,3% (Dirjen EBTKE, 2023).

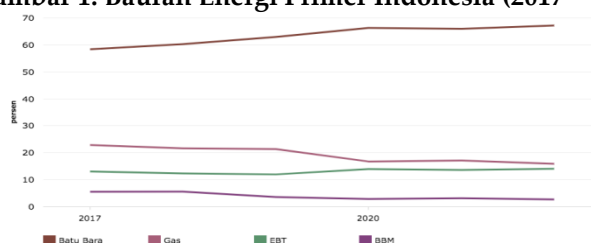
Selain daripada itu, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) melaporkan bahwa bauran EBT pada total energi primer Indonesia hanya mencapai 14,11%, dimana angka ini masih sangat jauh dari target yang harus dicapai oleh Indonesia di tahun 2025 mendatang yaitu minimal 23%. Kementerian Energid an Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam (Ahdiat, 2023) mencatat bahwa dalam 6 tahun terakhir, tren dari nilai bauran energi baru terbarukan (EBT) pada total energi primer Indonesia cenderung fluktuatif bahkan dapat dikatakan cenderung stagnan dikarenakan hanya naik bahkan turun sebanyak satu sampai dengan dua poin.

Jika tren ini terus berlanjut, target pemerintah untuk mencapai setidaknya 23% bauran energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2025 tidak akan tercapai, mengingat waktu yang dimiliki hanya tersisa 2 tahun lagi bagi Indonesia untuk mengejar target tersebut.

B. Kondisi Sosio-Ekonomi dan Teknologi

Kusnadi dalam (Nuraeni, 2018) menjelaskan bahwa kondisi sosio-ekonomi atau kondisi sosial dan ekonomi adalah kondisi kependudukan yang meliputi tingkat pendidikan, keuangan, kesehatan, konsumsi perumahan dan lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, merujuk pada kondisi masyarakat dan finansial Indonesia sebagai negara untuk melakukan transisi energi. Selain itu, aksesibilitas infrastruktur juga merupakan bagian dari kondisi ini termasuk teknologi dan inovasi yang mendukung. Kondisi sosial di Indonesia Indonesia menggambarkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil.

Gambar 1. Bauran Energi Primer Indonesia (2017 – 2022)



Sumber: Kementerian ESDM, 2023 dalam (Ahdiat, 2023)

Data yang tersajikan di atas menunjukkan bahwa bauran energi fosil yang berasal dari gas dan minyak (BBM) menunjukkan tren menurun. Akan tetapi, bauran energi fosil yang berasal dari batu bara justru menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 – 2022, bauran energi fosil dari batu bara meningkat sebanyak 8,8 poin. Sedangkan di periode yang sama, bauran energi yang berasal dari

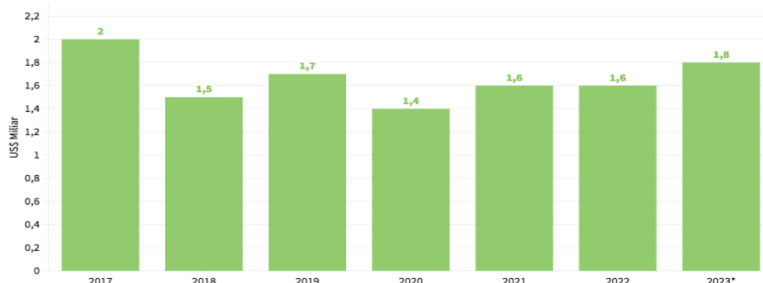
EBT hanya meningkat atau tumbuh sebesar 1,04 poin. Ini menunjukkan tren ketergantungan Indonesia pada energi fosil masih tinggi. (Ahdiat, 2023)

Kepala Satuan Kerja Khusus Minyas dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto dalam (Setiawan, 2021) menyatakan bahwa kebutuhan energi fosil Indonesia masih akan tetap tinggi sampai dengan masa-masa yang akan datang. Diprediksi, pada tahun 2030, kebutuhan minyak mentah Indonesia akan meningkat sampai 2 juta barel per hari. Dimana pada tahun 2020, kebutuhan minyak mentah Indonesia adalah 1.6 juta barel per hari. (Setiawan, 2021). Selain itu, gas bumi masih akan dimanfaatkan untuk bahan bakar bagi pembangkit listrik yang ada di Indonesia dan juga untuk memenuhi kebutuhan industri petrokimia. Meskipun secara bauran energi pemakaian migas (minyak dan gas bumi) akan diturunkan, namun dari segi volume, migas akan tetap meningkat. Tren ketergantungan pada bahan bakar fosil atau energi fosil menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan dan pemanfaatan EBT di Indonesia. Karena terlihat bahwa masih ada kesempatan yang diberikan bagi energi yang berasal dari fosil untuk terus dimanfaatkan. (Setiawan, 2021)

Kondisi ekonomi merujuk pada kesiapan finansial Indonesia untuk melakukan transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT). Indonesia merupakan negara dengan konsumsi energi terbesar di Asia Tenggara (Afriyanti, Sasana, & Jalunggono, 2020) dengan sumber energi terbesarnya berasal dari energi fosil yaitu mencapai 87,4% di tahun 2022 (Cendra, 2022). Ini menunjukkan ketergantungan Indonesia pada energi fosil cukup tinggi. Situasi ini membuat Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukan transisi energi mengingat kebutuhan untuk membangun infrastruktur serta transfer teknologi. Tak hanya itu, kebijakan-kebijakan yang mendorong masyarakat untuk bertransisi dari kebiasaan menggunakan energi fosil ke EBT, misalnya kebijakan insentif dan subsidi juga memerlukan dana.

Skema pendanaan Indonesia untuk transisi energi dilakukan tanpa memberatkan keuangan negara. Skema pembiayaan transisi energi Indonesia diimplementasikan melalui pendekatan campuran atau blended finance, yang melibatkan berbagai sumber dana termasuk lembaga pemerintah, bank pembangunan, lembaga keuangan komersial, dana perubahan iklim, investor ekuitas, perusahaan asuransi, serta dukungan dari filantropis lokal dan internasional (Badan Kebijakan Fiskal, n.d.)

Gambar 2. Realisasi Investasi EBT di Indonesia, 2017 – 2023



Genesa Lahope ¹⁾ **Implementasi Kebijakan Energi Nasional (Ken) Indonesia Menuju 23% Target Bauran Energi Baru Terbarukan (Ebt) 2025**

Ket: * target

Sumber: Kementerian ESDM dalam (Rizaty, 2023)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam (Rizaty, 2023) telah melakukan perhitungan dan menetapkan perkiraan kebutuhan investasi bagi sektor EBT Indonesia untuk mendorong tercapainya target bauran energi yang telah ditetapkan melalui Kebijakan Energi Nasional Indonesia (KEN).

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan investasi untuk mengembangkan pembangkit EBT di Indonesia sampai dengan tahun 2060 atau 40 tahun kedepan, mencapai USD1,04 triliun atau IDR 14.950 triliun. Artinya adalah Indonesia harus mendapatkan investasi setidaknya USD 25 miliar (IDR 360 triliun) per tahun untuk mencapai target netral karbon 2060 (sesuai dengan Perjanjian Paris) (Pahlevi, 2022).

Berdasarkan data yang terjasikan di atas, investasi sektor EBT Indonesia yang terealisasi masih jauh dari nilai investasi yang dibutuhkan. Meski demikian, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah menetapkan target investasi sektor EBT sebesar USD 3,91 miliar (Institute for Essential Service Reform, 2023). Akan tetapi, pada realisasinya, investasi yang berhasil didapatkan oleh Indonesia hanya sebesar USD 1,6 miliar (Rizaty, 2023), tidak berubah atau stagnan dari tahun sebelumnya.

Menurut Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), situasi ini disebabkan oleh sulitnya kondisi investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Selain itu, sejumlah peraturan yang berlaku saat ini dianggap menghambat kemajuan proyek-proyek pembangkit EBT (Rizaty, 2023). Mendukung pernyataan ini, pada FPCI Net Zero Emission Summit 2023 (Foreign Policy Community Indonesia, 2023), para Narasumber dalam sesi "Mimpi Indonesia Bebas Emisi: Apakah Kebijakan, Regulasi, dan Insentif Saat Ini Sudah Cukup?" yaitu Dr. Ridha Wirakusumah, CEO Indonesia Investment Authority (INA), Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator III Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiative Indonesia dan Agus Sari, CEO Landscape Indonesia, menyampaikan bahwa pada kenyataannya, banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor EBT di Indonesia. Akan tetapi, kebijakan pemerintah Indonesia yang kerap berubah-ubah (tidak konsisten), membuat adanya ketidakpastian dan keamanan bagi para investor untuk berinvestasi. Oleh karena hal ini, perbankan menganggap investasi sektor EBT di Indonesia sebagai sektor dengan resiko investasi yang tinggi. Perbankan dengan demikian tidak memberikan insentif suku bunga (dalam bentuk suku bunga yang rendah) bagi pengajuan pinjaman untuk berinvestasi di sektor EBT (Foreign Policy Community Indonesia, 2023).

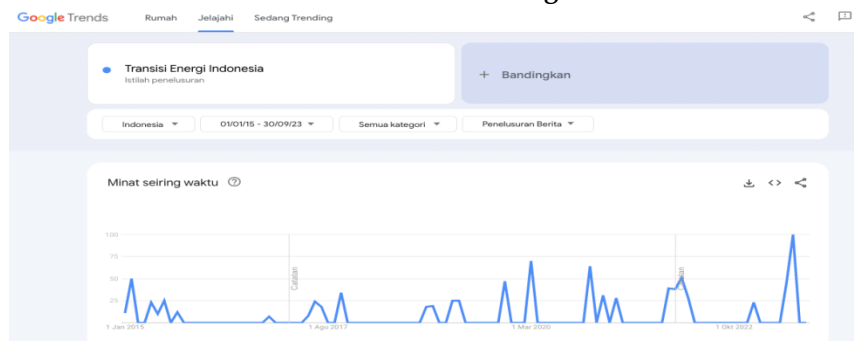
Pada *update* terbaru, demi mencapai target bauran energi dan transisi energi, Indonesia telah menetapkan target investasi untuk EBT di tahun 2022 adalah sebesar USD 3,91 miliar.

C. Perhatian Media

Urgensi krisis iklim dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang berkelanjutan penting untuk disampaikan kepada masyarakat, terutama melalui media massa. Hal ini agar masyarakat dapat mengajukan tuntutan terhadap pemerintah jika kebijakan pemulihan ekonomi tidak memprioritaskan upaya keberlanjutan lingkungan. (IESR, 2021) Selain itu, perhatian media juga dapat mendorong agar isu transisi energi ini diberikan perhatian lebih dan khusus, baik itu oleh masyarakat, pemerintah dan para pemangku kepentingan. (IESR, 2021).

Analisis menggunakan alat media monitoring 'Google Trends' dilakukan untuk melihat tren pemberitaan berbasis online tentang Transisi Energi di Indonesia. Kata kunci yang digunakan adalah 'Transisi energi Indonesia' dengan memasukkan rentang waktu tahun 2015 – 2023. Tahun 2015 dipilih sebagai rentang waktu awal karena tahun ini merupakan tahun setelah Kebijakan Energi Nasional yang mengatur tentang Energi Baru Terbarukan dikeluarkan.

Gambar 4. Minat Pemberitaan Isu Transisi Energi Indonesia tahun 2015 – 2023



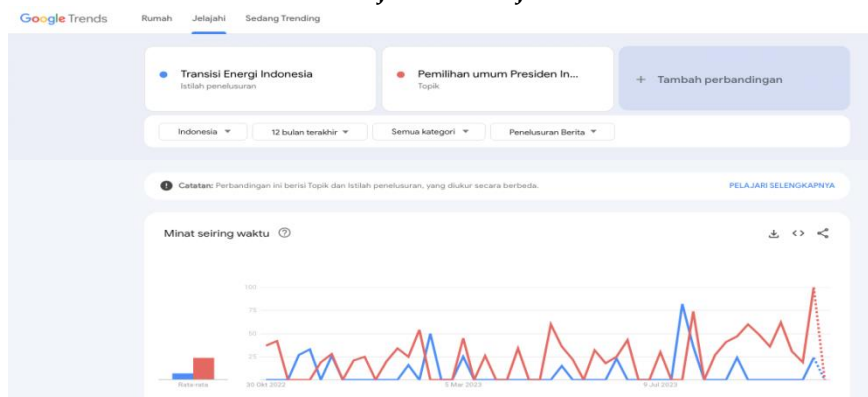
Sumber: Google Trends, Olahan Penulis, 2023

Dari hasil analisis Google Trends seperti terlihat pada gambar di atas, minat pemberitaan tentang Transisi Energi Indonesia terlihat fluktuatif dan jarak naik turunnya lumayan jauh. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh persaingan pemberitaan dengan isu-isu lainnya. Akan tetapi, masih terlihat tren positif, dimana terlihat meningkatnya pemberitaan terkait isu transisi energi setelah tahun 2018. Pada tahun 2015-2018, pemberitaan tentang transisi energi Indonesia masih sangat minim.

Saat ini, Indonesia sedang berada di tahun politik menuju pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024, dan secara bersamaan akan diikuti dengan Pemilihan Umum. Pemberitaan tentang situasi dan polemik politik mulai mendominasi pembahasan berita nasional saat ini. Situasi ini mempengaruhi pergeseran fokus media dalam memberitakan transisi energi Indonesia. Melihat gambar di atas, pemberitaan transisi energi Indonesia menurun drastis di pertengahan tahun 2023. Menurunnya pemberitaan tentang transisi energi Indonesia di tahun 2023 diakibatkan oleh dominasi pemberitaan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Dengan demikian, alat yang sama yaitu Google Trends digunakan untuk melihat perbandingan minat pemberitaan berbasis online antara isu transisi energi Indonesia dan isu pemilihan Presiden 2024. Kata kunci yang digunakan adalah 'Transisi Energi Indonesia' dan 'Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024', dengan rentang waktu 12 bulan terakhir. Berikut adalah data statistik dari hasil analitik Google Trends terkait ini:

Gambar 5. Perbandingan Minat Pemberitaan Isu Transisi Energi Indonesia dan Isu Pemilihan Presiden Juni 2022 – Juni 2023



Sumber: Google Trends, Olahan Penulis, 2023

Hasil analisis Google Trends menunjukkan bahwa pemberitaan tentang pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 mendominasi pemberitaan dibanding dengan pemberitaan tentang transisi energi Indonesia. Pemberitaan tentang energi terbarukan telah tergeserkan dengan minat pemberitaan tentang pemilihan Presiden 2024.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat bahwa tahun politik Indonesia menuju pemilihan Presiden 2024 secara keinsidentalitasan jatuh pada rentang waktu yang sama dengan tahun dimana Indonesia harus mencapai target pertama bauran energinya yaitu 23% di tahun 2025. Jika isu tentang transisi energi Indonesia semakin terkubur oleh isu pemilihan Presiden 2024, kesadaran publik, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya akan semakin rendah tentang urgensi untuk mendorong transisi energi dan pencapaian target EBT.

D. Dukungan Publik

Dukungan publik untuk transisi energi merujuk pada tingkat persetujuan, dukungan, atau keinginan masyarakat terhadap peralihan kebiasaan konsumsi energi dari sumber energi konvensional (seperti bahan bakar fosil) menuju sumber energi terbarukan dan berkelanjutan (seperti energi surya, angin, hidro, dan lainnya), untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Lembaga penelitian Friedrich Ebert Stiftung (Lauranti & Djamhari, 2017) melakukan penelitian dan menemukan bahwa masyarakat Indonesia memberikan dukungan yang positif pada transisi energi di Indonesia. Hal ini tercerminkan dari kesadaran masyarakat

Indonesia yang mulai berkeinginan untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan studi tersebut, di Indonesia, tren minat masyarakat untuk menggunakan atau memasang panel surya sebagai sumber listrik rumah tangga, menunjukkan peningkatan.

Akan tetapi, pada pembangunan infrastruktur EBT skala besar, penolakan dari masyarakat di wilayah-wilayah lainnya masih terjadi. Salah satunya seperti yang terjadi di Padarincang, Serang, Banten, dimana eksplorasi yang dilakukan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ditentang oleh masyarakat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021). Kejadian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan manfaat dan dampak dari sumber energi berkelanjutan masih belum cukup.

Dukungan masyarakat Indonesia untuk transisi energi memang terbilang bervariasi dan cenderung masih rendah. Ini juga merupakan salah satu tantangan Indonesia dalam melaksanakan transisi energi. Terkait ini, para pembicara di FPCI Net Zero Summit 2023 (Foreign Policy Community Indonesia, 2023) menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran tentang pentingnya transisi energi, sehingga enggan terlibat di dalamnya.

Dukungan publik lainnya datang dari berbagai pihak seperti lembaga donor dan sektor swasta yang menunjukkan dukungan mereka yang besar untuk menerapkan EBT di Indonesia. Akan tetapi, pihak-pihak ini tidak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan secara langsung. (Lauranti & Djamhari, 2017)

E. Sikap dan Keterampilan Kepemimpinan

Selain masyarakat, tentunya sikap dari para pemimpin dan pemangku kepentingan juga penting untuk melakukan transisi energi dan mendorong tercapainya target bauran EBT Indonesia sebagaimana telah ditetapkan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan jajarannya merupakan institusi pemerintah yang berperan penting disini. Akan tetapi, Lembaga penelitian Friedrich Ebert Stiftung berdasarkan penelitian yang dilakukan, menilai bahwa sikap Kementerian ESDM Bersama dengan jajaran pemerintah pusat secara keseluruhan, dianggap kurang konsisten dalam menjalankan dan mendorong kebijakan yang telah ditetapkan, salah satunya yaitu penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia (Lauranti & Djamhari, 2017). Pemerintah Indonesia terus memberikan kesempatan dan peluang pada pemanfaatan energi fosil, sehingga tren pemanfaatan energi fosil masih terus meningkat tinggi (Ahdiat, 2023). Pemerintah seolah-olah memberi dukungan untuk terus menggunakan bahan bakar fosil dengan argumen untuk mengamankan ketersediaan dan ketahanan energi, dipandang dari segi permintaan energi yang terus meningkat di negara ini (Lauranti & Djamhari, 2017).

Selain itu Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam acara "Team Europe Green Conference 2023: Pathways to a Prosperous Indonesia - Powered by Renewable

Energy” (Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, 2023) bahwa Indonesia untuk pertama kalinya akan memiliki Kebijakan yang secara khusus mengatur tentang Energi Baru Terbarukan. Kebijakan ini diharapkan akan rampung akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024. Berbagai target yang sudah tidak relevan lagi seperti target 23% di tahun 2025 akan diatur kembali dengan target-target yang baru.

Selain itu, Sugeng Suparwoto menyatakan bahwa terlihat pesimis bagi Indonesia untuk mencapai 23% bauran EBT di tahun 2025, mengingat saat ini bauran EBT yang tercapai hanya 14,11% dan waktu yang dimiliki tinggal 2 tahun lagi. Selain itu, saat ini fokus pemerintah dan berbagai pihak banyak yang tergeserkan oleh Pemilihan Presiden di tahun mendatang (Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, 2023).

Pernyataan dari Ketua VII DPR RI tersebut menunjukkan bahwa pemerintah seolah-olah menentukan target tapi dapat dengan mudah menyesuaikan kembali jika tidak tercapai. Tidak ada sanksi tegas yang ditetapkan untuk mendorong agar target yang ditetapkan dapat sebisa mungkin untuk dicapai.

SIMPULAN

Target 23% bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia yang harus dicapai di tahun 2025 pesimis untuk tercapai. Tren bauran EBT Indonesia pada 6 tahun terakhir bersifat fluktuatif, dan kecenderungan naiknya hanya 1 – 2 poin setiap tahunnya, dengan angka bauran EBT pada tahun 2022 hanya mencapai 14,11%. Kemungkinan besar tren ini akan berlanjut, dan skenario di tahun 2025 adalah bauran EBT pada total energi primer Indonesia hanya akan mencapai sekitar 16 – 18 %, atau kurang dari 20%.

Tren pencapaian target bauran EBT Indonesia yang naik hanya 1-2 poin, berpeluang besar untuk tetap berlanjut melihat kondisi sosio-ekonomi di Indonesia, perhatian media, dan dukungan publik yang tidak memadai serta sikap dan keterampilan kepemimpinan pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan yang belum konsisten.

Indonesia sebagai negara dengan konsumsi energi yang tinggi, dan sumber energinya yang di atas 85% berasal dari energi fosil membuat Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk bertransisi. Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 306 triliun per tahun untuk mencukupi kebutuhan transisi energi. Pada realisasi, pemerintah menetapkan target tahunan sebesar USD 2-4 miliar, akan tetapi target tahunan ini belum pernah tercapai. Di tahun 2021-2022, nilai investasi yang berhasil didapatkan hanya stagnan pada angka USD 1,6 miliar. Hal ini karena investasi pada sektor EBT di Indonesia dianggap high risk, sebagai akibat dari sikap pemerintah yang tidak konsisten terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Isu transisi energi yang tergeser dominasi pemilihan Presiden 2024. Fokus berbagai pihak termasuk pemerintah dan media sebagai saluran komunikasi publik terarah kepada pemilihan Presiden 2024.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan bersikap tidak konsisten dan masih terus memberikan kesempatan dan peluang pada pemanfaatan energi fosil. Pemerintah seolah-olah memberi dukungan untuk terus menggunakan bahan bakar fosil dengan argumen untuk mengamankan ketersediaan dan ketahanan energi, terlihat dari permintaan energi fosil yang terus meningkat di Indonesia. Selain itu, target yang ditetapkan dengan mudah akan disesuaikan kembali jika tidak tercapai, tanpa adanya sanksi yang membuat dorongan untuk bertransisi sesuai rencana tidak berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Y., Sasana, H., & Jalunggono, G. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Energi Terbarukan di Indonesia. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2.
- Ahdiat, A. (2023, February 21). *Bauran Energi Primer Indonesia (2017-2022)*. Retrieved from KataData: <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2023/02/21/pertumbuhan-ebt-masih-lemah-sampai-2022-kalah-dari-batu-bara>
- Badan Kebijakan Fiskal. (n.d.). *Energy Transition Mechanism*. Retrieved Oktober 2023, from Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/21-energy-transition-mechanism>
- Cendra, A. S. (2022, December 22). *ESDM Ungkap Konsumsi Energi Fosil Masih Dominan, EBT Masih Jauh dari Target*. Retrieved from Detik Finance: <https://finance.detik.com/energi/d-6475412/esdm-ungkap-konsumsi-energi-fosil-masih-dominan-ebt-masih-jauh-dari-target>
- Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam. (2023). Team Europe Green Conference: Underlines European Union's support to accelerate Indonesia's energy transition. *Team Europe Green Conference 2023: Pathways to a Prosperous Indonesia - Powered by Renewable Energy*. Jakarta.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2021, February 22). *Pengembangan PLTP Padarincang Terganjil Penolakan, ESDM: Warga Belum Paham*. Retrieved from Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: <https://dpmpstp.bantenprov.go.id/Berita/topic/637>
- Dirjen EBTKE. (2023, Januari 30). *PNBP Lampau Target, Menteri ESDM Sampaikan Rincian Torehan ESDM di Tahun 2022*. Retrieved Oktober 2023, from Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE): <https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/01/30/3410/pnbp.lampau.target.menteri.esdm.sampaikan.rincian.torehan.esdm.di.tahun.2022?lang=en>
- Foreign Policy Community Indonesia. (2023). Net Zero Emission Summit 2023. Jakarta.
- IESR. (2021, September 10). *Peran Media Dalam Perjalanan Transisi Energi Indonesia*. Retrieved Oktober 2023, from IESR: <https://iesr.or.id/peran-media-dalam-perjalanan-transisi-energi-indonesia>
- Institute for Essential Service Reform. (2023). *Press Release: Peluang Semakin Terbuka untuk Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan di 2023*. Retrieved from IESR:

<https://iesr.or.id/peluang-semakin-terbuka-untuk-percepatan-pengembangan-energi-terbarukan-di-2023>

- Lauranti, M., & Djahhari, E. A. (2017). *Transisi Energi yang Setara di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Nugroho, A. (2019, Desember 13). *Berani Hemat Pakai Cokelat?* Retrieved Oktober 2023, from <https://iesr.or.id/berani-hemat-pakai-cokelat#:~:text=Energi%20fosil%20yang%20biasa%20kita,juga%20berdampak%20buruk%20bagi%20kesehatan.>
- Nuraeni, Y. (2018). Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat. *Seminar Nasional Edusainstek*. Retrieved Oktober 2023
- Pahlevi, R. (2022, January 24). *Nilai Investasi Sektor EBTKE di Indonesia, 2017 - 2022*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/tak-penuhi-target-capaian-investasi-ebt-baru-74>
- Perserikatan Bangsa - Bangsa. (n.d.). *Kerja kami pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Retrieved from Perserikatan Bangsa - Bangsa: <https://indonesia.un.org/id/sdgs>
- Rizatya, M. A. (2023, September 20). *Realisasi Investasi EBT Indonesia Stagnan pada 2022*. Retrieved Oktober 2023, from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/realisasi-investasi-ebt-indonesia-stagnan-pada-2022>
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework Of Analysis. *Policy Studies Journal Volume 8, Issue 4*, 538-560.
- Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. (2022). *Laporan Analisis Neraca Energi Nasional 2022*.
- Setiawan, V. N. (2021, January 29). *Ketergantungan Energi Fosil, Indonesia Rentan Krisis Energi*. Retrieved from KataData: <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/6013e4ade4c3a/rapuhnya-ketahanan-energi-ri-yang-didominasi-bahan-bakar-fosil>
- SolarKita. (2021, August 25). *Paris Agreement & Pencapaian Indonesia dalam Mengatasi Isu Climate Change*. Retrieved from SolarKita: <https://kumparan.com/solar-kita/paris-agreement-and-pencapaian-indonesia-dalam-mengatasi-isu-climate-change-1wOq9CGxh9C/full>
- Suwatno, D. S. (2022). Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2).
- UNCC. (n.d.). *Perjanjian Paris. Apa Itu Perjanjian Paris?* Retrieved Oktober 2023, from United Nations Climate Change: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>